



LAPORAN KINERJA PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

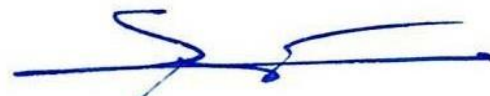
Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, pusat perancangan dan kajian kebijakan hukum telah melakukan serangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 guna mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Evaluasi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dan bagian dari akuntabilitas Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.

Dalam rangka Pelaksanaan Reformasi dan birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2024. Laporan Kinerja Pusat perancangan dan kajian kebijakan hukum disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap laporan ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolok ukur peningkatan kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus ditingkatkan, kritikan dan masukan yang bersifat membangun masih kami perlukan untuk pelaksanaan kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Pusat Perancangan dan
Kajian Kebijakan Hukum,



Andi Erham, S.E., M.M., Ph.D.
NIP. 196512031986031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas dan Fungsi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	2
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. RENCANA STRATEGIS	4
	1. Visi dan Misi	4
	2. Tujuan dan Sasaran	5
	B. PERJANJIAN KERJA	6
	C. STRUKTUR PENGANGGARAN	9
	D. MEKANISME PENGUKURAN KINERJA	9
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Tahun 2022	12
	B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	34
	B. Rencana Perbaikan Tahun 2023	35
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum merupakan Unit kerja eselon II yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Sebagai *supporting system* atas pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum merupakan salah satu unit kerja yang memberikan dukungan keahlian kepada alat kelengkapan DPD RI dan dukungan administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI. Dinamika hubungan politik dan administrasi dalam penguatan kelembagaan DPD sangat berpengaruh. Efek yang paling relevan dengan tugas pokok dan fungsi di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum adalah keterbatasan penyediaan anggaran kajian sehingga kajian terhadap usulan RUU menjadi tidak optimal.

Selain pengaruh eksternal, permasalahan utama yang masih dihadapi oleh Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum antara lain: belum terbentuknya kultur belajar dan mental model dukungan keahlian; belum maksimalnya implementasi sesuai tugas pokok dan fungsi; sarana prasarana belum memadai; dan kualitas maupun kuantitas SDM Aparatur belum optimal.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

1. Tugas dan Fungsi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Sesuai dengan Pasal 169 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja ditegaskan bahwa Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perancangan undang-undang, pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan undang-undang, Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum serta pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 170 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi di bidang Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum;
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum;
3. Pelaksanaan dukungan di bidang Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum;
4. Koordinasi penyusunan laporan tahunan sekretaris jenderal dewan perwakilan daerah republik indonesia;
5. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pusat perancangan dan kajian kebijakan hukum; dan

6. Pelaksanaan tata usaha pusat perancangan dan kajian kebijakan hukum.

2. Struktur Organisasi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum terdiri atas:

- a. Bidang Perancangan dan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah;
- c. Sub - Bagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2

Struktur Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

VISI : “Berdasarkan pemahaman visi Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu: **Sistem Pendukung yang Profesional, Akuntabel dan Modern kepada DPD RI**, maka dirumuskan visi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dengan mengutamakan terjadinya sinergitas terhadap visi Sekretariat Jenderal DPD RI, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Berdasarkan hal tersebut, Visi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum yaitu:

“TERWUJUDNYA DUKUNGAN KEAHLIAN DI BIDANG PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN, SERTA PENYEDIAAN INFORMASI HUKUM YANG PROFESIONAL, ANDAL, MODERN, DAN AKUNTABEL”

Sejalan dengan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI adalah:

MISI : Sejalan dengan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI adalah: **Memberikan dukungan keahlian Perancangan dan Kajian Kebijakan, serta Penyediaan Informasi Hukum Yang Optimal Kepada DPD RI.**

2. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi dan misi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sampai dengan 2020-2024 adalah:

Tujuan :

Terwujudnya peningkatan dukungan Perancangan, Pengkajian, dan Penyediaan Informasi Hukum.

Indikator Kinerja:

Persentasi hasil rancangan dan penelitian/pengkajian yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI.

Sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian, kajian dan perancangan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan

Indikator Kinerja : 1. Rasio pelaksanaan dukungan Perancangan Undang-Undang dari DPD RI oleh bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan terhadap total rancangan undang-undang dari DPD RI yang dihasilkan.

2. Rasio Jumlah hasil kajian kebijakan Hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total hasil kajian kebijakan Hukum yang dihasilkan bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan
3. Rasio jumlah produk hukum yang dipublikasikan dan dapat diakses terhadap total produk hukum yang dihasilkan DPD RI

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan dapat mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan bersama Sekretaris Jenderal DPD RI, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum. Seluruh Program Kajian yang dilaksanakan oleh Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum diwadahi dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI dalam satuan kerja Sekretariat Jenderal DPD. Dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI salah satu program adalah Penyelenggaraan Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum yang memiliki Sasaran Program Meningkatnya pemanfaatan Laporan hasil kajian di alat kelengkapan DPD RI dan Kelembagaan DPD RI, Meningkatnya pemanfaatan naskah pidato, sambutan, dan telaahan bagi pimpinan DPD dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI, dan Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dalam jurnal ilmiah DPD RI yang tertuang dalam sasaran kegiatan perjanjian kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum DPD RI. Perjanjian Kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	3,3	skala
		Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	3,3	skala
		Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah	3,3	skala
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan hukum oleh DPD RI	Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan terhadap total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	90	%
		Rasio pelaksanaan dukungan Perancangan Undang-Undang dari DPD RI oleh bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan terhadap total rancangan undang-undang dari	90	%

		DPD RI yang dihasilkan		
		Rasio Jumlah hasil kajian kebijakan Hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total hasil kajian kebijakan Hukum yang dihasilkan bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan	90	%
		Rasio jumlah produk hukum yang dipublikasikan dan dapat diakses terhadap total produk hukum yang dihasilkan DPD RI	93	%

Berdasarkan sasaran program/kegiatan, indikator dan target kinerja dalam perjanjian kinerja di atas terlihat bahwa sebagian besar indikator kegiatan di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum adalah Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan.

Untuk mengukur pencapaian target-target sebagaimana disebut di atas, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum telah mengembangkan beberapa tahapan proses dan instrumen sebagai berikut:

1. Pada kegiatan kajian terdapat beberapa tahapan proses untuk pencapaian target, yaitu: penyusunan tema berbasis prolegnas, evaluasi proposal, evaluasi mid term, dan evaluasi final term.
2. Pada kegiatan menyusun produk hukum DPD RI yang di publikasikan dalam website JDIH DPD RI yang sesuai dengan dengan standarisasi pengelolaan website JDIH DPD RI.
3. Merancang berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan target-target tersebut di atas dalam bentuk rencana triwulanan.
4. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulanan untuk melihat progres pencapaian target.

C. STRUKTUR PENGANGGARAN

Untuk terselenggaranya kegiatan Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum DPD RI sebagaimana diatas, maka struktur penganggaran yang berasal dari rupiah murni yang bersumber pada APBN sebesar Rp. 2.125.000.000,- pada RAB Pagu Alokasi Anggaran Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Tahun 2024.

Adapun penjabaran anggaran Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum selama masa anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Struktur Penganggaran Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum 2024

No	Sumber Anggaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Jumlah dalam (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	APBN 2024	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Rp. 2.125.000.000,-
		Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan	

D. MEKANISME PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah/lembaga dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Dalam Pengukuran Kinerja ini terdiri dari sasaran, Indikator Kinerja Utama, Target, serta Formulasi Pengukuran Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Sasaran dan Indikator Utama yang terdapat dalam Balanced Score Card

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULA PENGUKURAN
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian	Skala 3,3	1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) 2. Hitung nilai kepuasan

	Hukum	Kebijakan Hukum.		untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf). 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(fn)) / (\Sigma f)$ 4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$ 5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dan perancangan oleh DPD RI	Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan terhadap total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	90%	Rasio total rancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan - _ x100% total rancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Tahun 2024

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum pada tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator pada Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum pada tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum yang telah dilakukan pada awal tahun 2024 dapat dijabarkan untuk perbandingan antara target dan realisasi yang telah dicapai pada akhir tahun 2024 sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.	3,3	3,5	106%
		Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bidang Perancangan	3,3	3,5	106%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peraturan Perundang-undangan			
		Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Pusat dan Daerah	3,3	3,5	106%
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan hukum oleh DPD RI	Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan	90%	100%	111%
		Rasio pelaksanaan dukungan Perancangan Undang-Undang dari DPD RI oleh bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan terhadap total rancangan undang-undang dari DPD RI yang dihasilkan	90%	100%	111%
		Rasio Jumlah hasil kajian kebijakan Hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total hasil kajian kebijakan	90%	100%	111%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Hukum yang dihasilkan bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan			
		Rasio jumlah produk hukum yang dipublikasikan dan dapat diakses terhadap total produk hukum yang dihasilkan DPD RI	93%	100%	107%

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dari masing-masing sasarnya adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Dalam rangka mengukur kualitas kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, dilakukan survei tingkat kepuasan atas pelayanan dan produk Setjen DPD RI kepada stakeholders, yaitu Anggota DPD RI pada akhir tahun 2024. Selain untuk mengukur tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan Kesekretariatan DPD RI, survei juga dilakukan untuk mendapatkan masukan Anggota DPD RI dan Kesekretariatan DPD RI terkait kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, Melalui masukan ini, diharapkan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum semakin meningkatkan kinerjanya sehingga tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan Kesekretariatan DPD RI terhadap layanan yang diberikan juga semakin meningkat.

INDIKATOR SASARAN 1:

Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Pengukuran tingkat kepuasan pada Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dilakukan dengan instrument survey melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan kajian kebijakan dan hukum serta proses penyusunan RUU (kualitas/kemutakhiran data, kualitas analisis, kecepatan penyediaan data, kesesuaian tema dengan kebutuhan persidangan, kompetensi legal drafter dan anal
- Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum - JDIH (kelengkapan informasi, kemutakhiran informasi, dan kemudahan mengakses informasi)?

1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengolahan survei pada Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum pada tahun 2024 menunjukkan data sebagai berikut:

- jumlah data atau agregat bobot pengukuran: 2373
- banyak data agregat jumlah pertanyaan perbiro/pusat yang dijawab: 666

Tingkat Kepuasan: $\frac{2373}{6666} = 3,563063063$

Survei menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat puas terhadap kualitas layanan kajian kebijakan dan hukum serta proses penyusunan RUU.

Mayoritas responden juga sangat puas terhadap kualitas layanan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum - JDIH. Namun, masih terdapat umpan balik dari responden yang perlu mendapatkan atensi sebagai berikut: - Beberapa responden mengeluhkan beberapa data dan informasi dalam JDIH yang belum terupdate secara cepat. Responden menyarankan agar JDIH dapat dimutakhirkan secara cepat dan berkala.

2. Perbandingan Realisasi Sasaran Dengan Target Jangka Menengah

Pada Target Jangka Menengah sesuai Rencana Strategis Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum DPD RI 2020-2024 tahun 2024 Setjen DPD RI telah menargetkan skala 3,3 (puas) dari skala 4 (sangat puas) tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum. Pada realisasinya Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum DPD RI berhasil menghasilkan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada skala 3,5 (puas) terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum sehingga capaian target memperoleh nilai 106%.

3. Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Pada tahun 2023 realisasi tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum ada pada skala 3 (puas dari target Rencana Strategis Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum DPD RI 2020-2024 pada skala 3.27 (puas), artinya capaian kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum pada tahun 2023 mencapai 111%.

Pada tahun 2024 ini kepuasan Anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum di targetkan pada skala 3.3 namun untuk realisasi tingkat kepuasan anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum naik pada skala yang sama dengan Tahun 2024 yaitu pada skala 3.5 (puas), maka capaian kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum pada tahun 2023 di angka 106%.

Mengacu pada indikator sasaran yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal DPD dalam mengukur kinerja dari Pusperjakum serta perbandingannya dari Tahun 2023 dengan capaian di Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.	3.27	3	3.3	3,5

Tabel.5: Perbandingan Capaian Pusperjakum di Tahun 2023 dengan Capaian Pusperjakum di Tahun 2024

4. Analisa Capaian Kinerja dengan Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2024 Pagu Anggaran yang ditargetkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.125.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.022.249.973,- Dengan persentase capaian kinerja sebesar 106% dan serapan anggaran sebesar 95% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah cukup optimal dan efisien dengan memperhatikan asas penggunaan anggaran berbasis program sehingga kinerjanya perlu dipertahankan.



5. Upaya Pencapaian Sasaran

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan maka diperlukan adanya peningkatan layanan kepada Anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI, baik dari perbaikan sistem dalam bentuk standar layanan (SOP), informasi prosedur layanan serta menjaga kualitas layanan yang sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada Anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI. Unit kerja di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum perlu bersinergi terbuka menerima kritik dan tetap bersikap ramah serta selalu bersama memberikan solusi terhadap keluhan-keluhan dan layanan yang diberikan belum memuaskan Anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI. Selain itu, Sekretariat Jenderal DPD RI harus memiliki mekanisme evaluasi

layanan, baik berupa survei maupun questioner sebagai dasar perbaikan layanan di unit-unit kerja.

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya pemanfaatan perancangan dan kajian kebijakan hukum dari total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan tugas sekretariat DPD RI memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berupa dukungan perancangan Undang-undang di alat kelengkapan DPD RI, Kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-undang, dan dukungan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPD RI. Proses Kajian Naskah Akademik dimulai dari penentuan tema yang melibatkan persidangan DPD RI terutama terkait dengan prolegnas sangat menunjang pencapaian kinerja. Keberhasilan dalam pencapaian target ini karena adanya proses komunikasi dan koordinasi dengan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah, sehingga *output* dari kajian ini diadopsi sebagai *background paper* oleh alat-alat kelengkapan dalam proses penyusunan RUU sesuai dengan agenda prolegnas.

INDIKATOR SASARAN 2:

Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan terhadap total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

1. Capaian Kinerja Tahun 2024

1. Pada tabel dibawah ini tergambar pada realisasi, capaian, dan kegiatan penelitian, kajian dan perancangan yang telah dilakukan oleh Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Rasio pelaksanaan dukungan Perancangan Undang-Undang dari DPD RI	Persentase	90%	100%	111%

oleh bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan terhadap total rancangan undang-undang dari DPD RI yang dihasilkan				
Rasio Jumlah hasil kajian kebijakan Hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total hasil kajian kebijakan Hukum yang dihasilkan bidang perancangan dan pemantauan peraturan perundang-undangan	Persentase	90%	100%	111%

Pada tahun 2024 Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum telah melaksanakan dukungan keahlian di alat kelengkapan DPD RI dengan menempatkan staf fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis kebijakan pusat perancangan dan kajian kebijakan hukum untuk ikut pendampingan di alat kelengkapan DPD RI melalui surat tugas Nomor: PU.01/726/DPDRI/IX/2022.

Tahun 2024 Pusat perancangan dan kajian kebijakan hukum juga menerima permintaan penyusunan Naskah Akademik dari Komite II. Selain ikut dalam pendampingan di Alat Kelengkapan, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum juga menyusun kajian dan draft untuk menjadi masukan bagi alat kelengkapan dalam penyusunan RUU usul DPD RI. Kajian/ NA yang dihasilkan pusat perancangan dan kajian kebijakan hukum sudah disesuaikan dengan kebutuhan Alat Kelengkapan DPD RI sehingga hasil pengkajian ini dapat mencerminkan kebutuhan dan ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan. Ada 1 NA dan 3 kajian yang dihasilkan oleh Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum pada tahun 2024 yang dirincikan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Hasil Kajian/NA Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Kedeputan
Bidang Persidangan yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI pada
Tahun 2024

No.	Tema/Judul Kajian/Penelitian	Jenis Kajian /NA	Digunakan Oleh Alat Kelengkapan DPD RI
1.	Konsep Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang tentang Perkotaan	NA	Komite I
2.	Kajian Akademik Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Usul DPD RI Tahun 2025-2029	Kajian	PPUU
3.	Analisis & Kajian Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah terkait Ketahanan Pangan	Kajian	BULD
4.	Kajian tentang Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Umum dan Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas	Kajian	Komite III

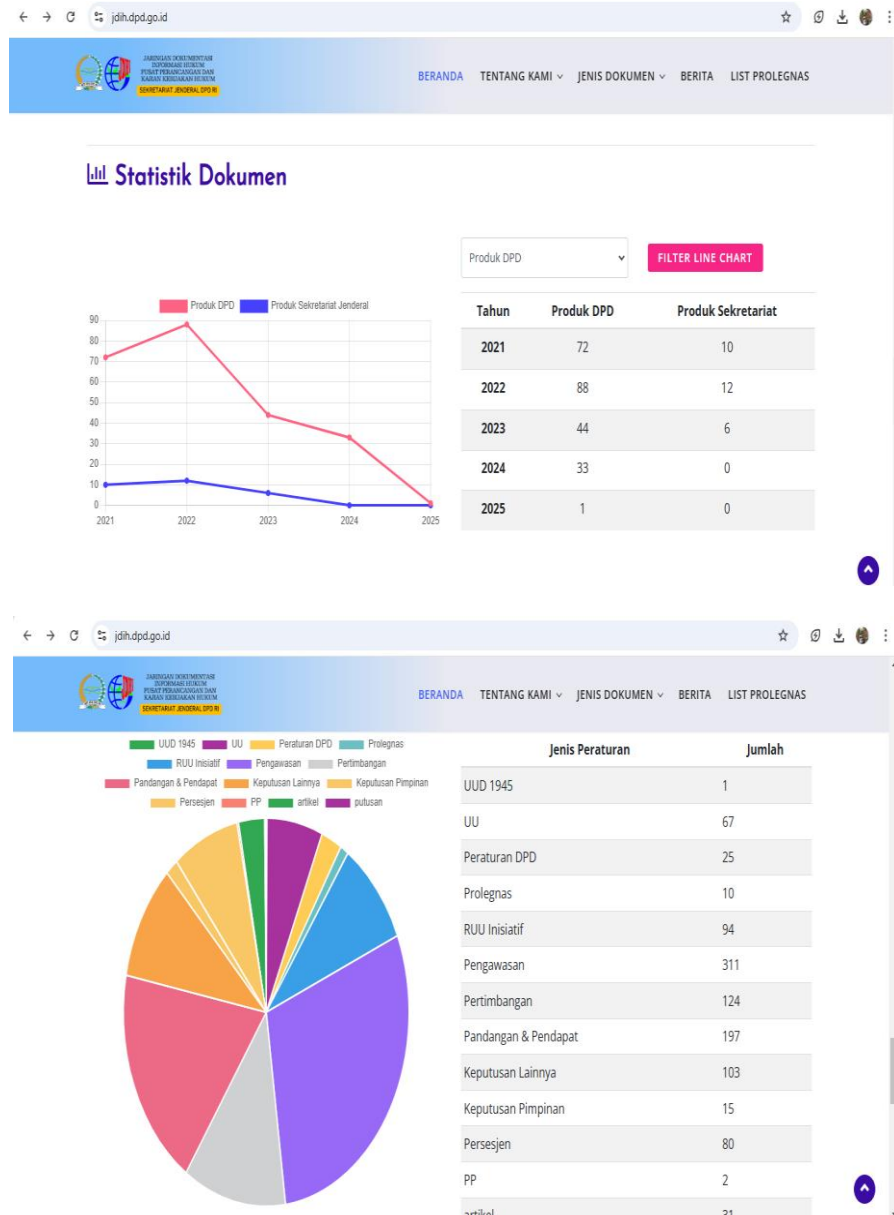
2. pada tabel dibawah ini telah dilakukan penghitungan Rasio jumlah produk hukum yang dipublikasikan dan dapat diakses terhadap total produk hukum yang dihasilkan DPD RI.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Rasio jumlah produk hukum yang dipublikasikan dan dapat diakses terhadap total produk hukum yang dihasilkan DPD RI	Persentase	93%	100%	107%

Pusat Perancangan dan Kajian kebijakan Hukum juga mendukung kegiatan alat kelengkapan DPD RI melalui ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum DPD RI yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah melalui *website* JDIH yang sudah terintegrasi dengan dengan JDIHN. Tahun 2024 sudah 33 Produk Hukum yang diupdate di website <https://jdih.dpd.go.id/> sehingga total produk hukum DPD RI yang sudah di update sampai saat ini adalah 959 Produk Hukum.

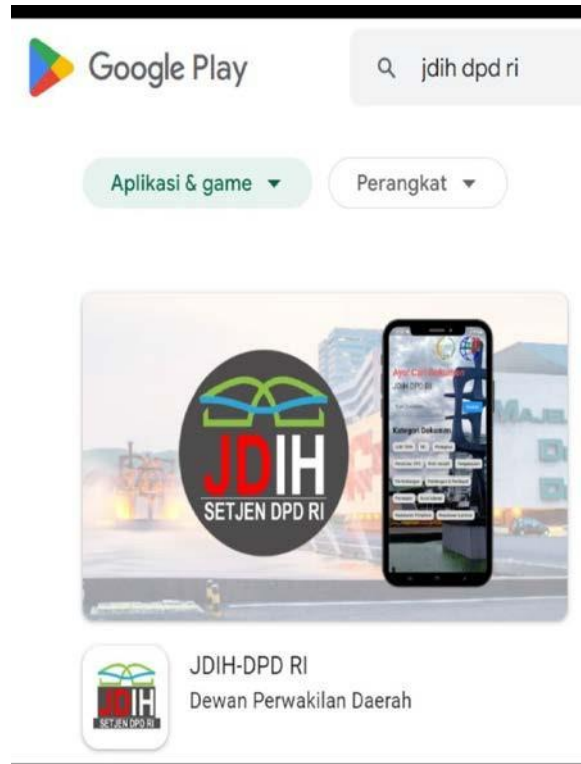
Gambar 3.2.
Tampilan Statistik Data Produk Hukum di Website JDIH DPD RI

<https://jdi.h.dpd.go.id>



Di tahun 2024 JDIH Setjen DPD RI semakin serius dalam mengelola dan mengembangkan dokumentasi produk hukum DPD RI. Kali ini JDIH Setjen DPD RI Telah berinovasi dengan meluncurkan aplikasi JDIH Setjen DPD RI di platform Android. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan Pimpinan dan semua Anggota DPD RI termasuk seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk hukum DPD RI dimanapun dan kapanpun.

Gambar 3.2.
Tampilan *Aplikasi* JDIH DPD RI



Selain itu JDIH DPD RI terus melakukan pengembangan website JDIH DPD RI dengan menambahkan fitur baru seperti menambahkan statistik pengunjung, survei kepuasan pengguna layanan dan lain sebagainya.

Setiap tahun JDIH DPD RI ikut berpartisipasi dalam Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2024. Dimana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menganugerahkan 57 Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik Tahun 2023. Pada Tahun 2023 JDIH DPD RI juga mendapatkan penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara.

Gambar 3.1.

Foto penerimaan penghargaan JDIH DPD RI sebagai Anggota Jaringan Dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara pada tanggal 12 Oktober 2023, diterima oleh Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI



Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum juga menyajikan informasi hukum berupa artikel hukum mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah, terangkum dalam jurnal Bhineka Tunggal Ika yang terbit setiap tahun.

Gambar 3.3.
Jurnal Bhineka Tunggal Ika Volume 8 Tahun 2023, Pusat Perancangan
dan Kajian Kebijakan Hukum.



Tabel 3.3.
Daftar Kajian Ilmiah Jurnal Bhineka Tunggal Ika
Volume 9 Tahun 2024

No.	Judul Kajian Ilmiah
1.	Peraturan Dewan Perwakilan Daerah (Berdasarkan Perintah Atribusi dan Pendelegasian Kewenangan Undang-Undang)
2.	Peran Tata Tertib Dalam Membangun Dewan Perwakilan Daerah Yang Ideal
3.	Menggali Pentingnya Dukungan Internal dan Peran Media Untuk Meciptakan DPD Yang Bermartabat
4.	Optimalisasi Peran DPD RI Dalam Mempresentasikan Kepentingan Daerah Melalui Program Legislasi Nasional
5.	Upaya Penguatan Fungsi Legislasi DPD RI Dalam System Ketatanegaraan Indonesia
6.	Transformasi Fungsi Legislasi DPD: Menuju Penguatan DPD Dalam Pembentukan Kebijakan Publik
7.	Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah Yang Efektif dan Berkelanjutan
8.	Optimalisasi Peran Sekretariat Jenderal DPD RI Sebagai Supporting System DPD RI

9.	Penguatan Peran dan Keterwakilan Perempuan Anggota DPD RI Periode 2024-2029
10.	Refleksi 20 Tahun DPD: Penguatan Fungsi Legislasi Atau Penguatan Fungsi Pengawasan
11.	Tantangan dan Peluang DPD RI dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
12.	Analisis Kewenangan DPD RI Dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Pusat perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum mempunyai tugas menyusun laporan kinerja lembaga DPD RI dan laporan kinerja sekretariat jenderal DPD RI.

Gambar
Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2022-2023



Gambar
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Sidang 2023-2024



2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Berdasarkan data Tahun 2023 dalam meningkatkan pemanfaatan perancangan dan kajian kebijakan hukum oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan Pusperjakum menargetkan sebesar 90%, realisasinya melebihi target sebesar 100% dengan capaian 111%. Secara produktifitas, di Tahun 2023 Pusperjakum sangat optimal dalam menghasilkan output.

Pada Tahun 2024, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum tetap berupaya melakukan terobosan dan inovasi untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga menghasilkan kualitas hasil kajian sesuai dan berguna bagi pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI . Pemanfaatan perancangan dan kajian kebijakan hukum oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan DPD RI Pusperjakum menargetkan sebesar 90%, realisasinya melebihi target sebesar 100% dengan capaian 111%.

Mengacu pada indikator sasaran yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal DPD dalam mengukur kinerja dari Pusperjakum serta perbandingannya dari Tahun 2023 dengan capaian di Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, kajian, dan perancangan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan	Rasio hasil penelitian, kajian, dan perancangan yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI terhadap	90%	100%	90%	100%
	total penelitian, kajian, dan perancangan yang dihasilkan				

Tabel.5: Perbandingan Capaian Pusperjakum di Tahun 2023 dengan Capaian Pusperjakum di Tahun 2024

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perancangan undang-undang, pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan undang-undang, pengkajian kebijakan dan hukum serta pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Capaian indikator kinerja Rasio hasil kajian, dan perancangan yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI terhadap total penelitian, kajian dan perancangan yang dihasilkan sebesar 100% sudah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2020-2024 yaitu sebesar 89%. Pencapaian target dan realisasi kinerja dari Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum 2024-Target
Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2024		Renstra
		Target	realisasi	target
Meningkatnya Kemanfaatan Laporan hasil kajian di alat kelengkapan DPD RI dan Kelembagaan DPD	Rasio hasil penelitian, kajian, dan perancangan yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI terhadap total penelitian, kajian dan perancangan yang dihasilkan	90%	100%	89%

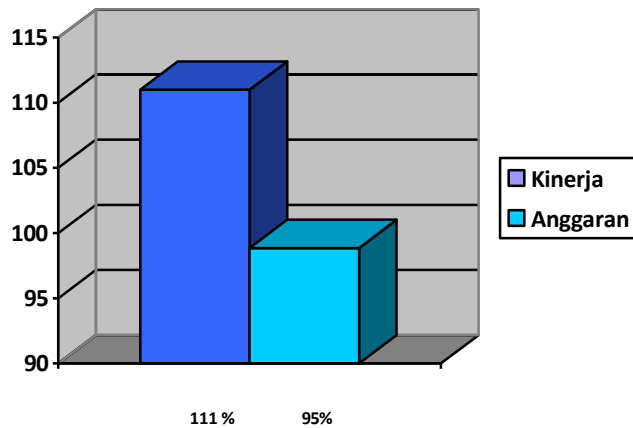
Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa pencapaian/realisasi pada kegiatan kajian pada tahun 2024, sebesar 100% sudah malapaui 11% diatas target Jangka Menengah Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 90%.

4. Analisa Capaian Kinerja dengan Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2024 Pagu Anggaran yang ditargetkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.125.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.022.249.973,-. Dengan persentase capaian kinerja sebesar 106% dan serapan anggaran sebesar 95% menunjukan bahwa penggunaan

anggaran sudah cukup optimal dan efisien dengan memperhatikan asas penggunaan anggaran berbasis program sehingga kinerjanya perlu dipertahankan.

Perbandingan Realisasi Capaian dan Kinerja



5. Upaya Pencapaian Sasaran

Berbagai tahapan langkah-langkah kegiatan guna mewujudkan capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Langkah kegiatan dalam mewujudkan capaian kinerja untuk memenuhi target indikator Rasio hasil penelitian, kajian, dan perancangan yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI terhadap total penelitian, kajian dan perancangan yang dihasilkan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Penentuan tema-tema penelitian dan kajian dilakukan sesuai dengan permasalahan RUU dalam Prolegnas prioritas tahunan yang dilakukan melalui koordinasi bersama alat kelengkapan.
 - b. Setelah tema-tema kajian disepakati oleh Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, maka diselesaikanlah kajian tersebut agar dapat di berikan manfaatnya ke masing- masing Alat Kelengkapan DPD RI.
 - c. Berkoordinasi dengan Alat Kelengkapan DPD RI agar tetap selaras dalam Penyusunan Kajian Penelitian dan Penyusunan Draft Naskah Akademis yang digunakan pada Alat Kelengkapan sesuai dengan Tahun Anggaran yang digunakan.
 - d. Mengundang Para Reviewers atau pakar Narasumber dalam Kegiatan Penelitian/ Pengkajian di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.
2. Langkah kegiatan dalam mewujudkan capaian kinerja indikator Rasio jumlah produk hukum yang dipublikasikan dan dapat diakses terhadap total produk hukum yang dihasilkan DPD RI sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dokumen produk hukum dewan perwakilan daerah republik indonesia;
 - b. Menganalisa dokumen produk hukum dewan perwakilan daerah republik indonesia yang akan di publikasikan di website JDIH DPD RI;
 - c. Membuat abstraksi dan katalog hukum dari peraturan yang akan di publikasikan di website JDIH DPD RI sesuai dengan standar pengelolaan website jdih dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum;

- d. Mempublikasikan produk hukum dewan perwakilan rakyat republik indonesia di website jdih DPD RI yang sudah terintegrasi dengan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
- e. Mengevaluasi dan pemantauan produk hukum DPD RI yang ada di website JDIH DPD RI.

6. Kondisi Sumber Daya Manusia di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum

Penyebab utama keberhasilan adalah soliditas kerjasama 2 (dua) Bidang yang di dukung oleh Sumber Daya Aparatur (staf) sejumlah 20 orang di Pusat Perancangan Kajian dan Hukum. Kerjasama yang solid dan kemitraan untuk meningkatkan kinerja itu, telah mempermudah realisasi kinerja di tahun 2024. Berikut kondisi SDM pada Pusat Perancangan Kajian dan Hukum pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.5

KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jabatan	Pendidikan					Jumlah			Ket
		S M A	D 3	S1	S 2	S 3	Terisi	Kebutuhan	Kurang	
1.	Kepala Pusat					1	1	1		• 1 ASN DPD
2.	Kepala Bidang			1	1		2	2		• 2 ASN DPD
3.	Kepala Subbidang / Subbag			1			1	1		• 1 ASN DPD
4.	Fungsional Umum/ Fungsional tertentu/ PPNPN			24	6		30	30		• 3 orang ASN Fungsional Umum • 26 ASN Fungsional tertentu: - Legal Drafter/ Perancang UU 7 orang;

No.	Jabatan	Pendidikan					Jumlah			Ket
		S M A	D 3	S1	S 2	S 3	Terisi	Kebutuhan	Kurang	
4.	Fungsional Umum/ Fungsional tertentu/ PPNPN (Lanjutan)			24	6		30	30		- Analis Kebijakan 8 orang; - Analis Pemantauan 7 orang; - Pranata Komputer 2 orang; - Arsiparis 2 orang. - 1 PPNPN
Jumlah Seluruhnya							34	34		

Sumber daya manusia di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum secara kuantitas sudah mencukupi, selanjutnya dapat meningkatkan mutu, kemampuan/kualitas staf dengan diklat-diklat yang relevan untuk mendukung kinerja Sumber daya manusia di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum agar dapat bekerja secara efisien untuk memenuhi target penyelesaian tugas dan fungsi pada di setiap kegiatan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum. Penempatan staf sesuai dengan bidang keilmuan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi maksimalnya output dari masing-masing Biro/Pusat.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada hakikatnya adalah bentuk pertanggungjawaban dari aspek penyerapan anggaran, dimana semakin tinggi penyerapan anggaran (capaian) akan semakin baik pula akuntabilitas keuangannya, karena orientasi anggaran berbasis kinerja adalah bilamana anggaran yang telah disediakan harus dapat diserap seoptimal mungkin untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Capaian realisasi anggaran Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Jumlah dalam (Rp)	Realisasi dalam (Rp)	Saldo Dalam (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum				
2.	Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan terhadap total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	2.125.000.000	2.022.249.973	102.750.027	95%
Jumlah		2.125.000.000	2.022.249.973	102.750.027	95%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum gambaran kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum DPD RI sebagaimana tabel 4.1. dibawah ini:

Tabel 4.1.
Capaian Sasaran Kegiatan
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	3.3	3,5	95%
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan hukum oleh DPD RI	Rasio perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total perancangan dan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan	90%	100%	111%

Rata-rata capaian kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum sebagaimana terlihat pada tabel diatas, untuk persentase kemanfaatan hasil kajian mengalami peningkatan.

Beberapa aspek yang menjadi kendala dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan antara lain:

- Kurang Sarana dan Prasana dalam mendukung pengelolaan JDIH khususnya perpustakaan hukum JDIH DPD untuk koleksi buku-buku hukum di perpustakaan JDIH dan layanan digital JDIH tempat dimana pengunjung dapat mengakses segala kebutuhan informasi seperti database jurnal dan informasi lain yang ada di internet.

- Sudah ada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia namun belum dilaksanakan sepenuhnya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI terutama dalam melakukan pengumpulan Dokumen Hukum dan/atau Prociuk Hukum.
- Kurangnya pelatihan untuk pengembangan dan pengelolaan website <https://jdih.dpd.go.id/> maupun media social sebagai sarana publikasinya.
- Kurangnya pelatihan keahlian untuk pengembangan kompetensi SDM bagi fungsional di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum.
- Belum ada pedoman dalam penyusunan kajian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menyeragamkan tahapan-tahapan dalam penyusunan kajian;
- Belum ada pedoman pembagian tugas fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di alat kelengkapan DPD RI;

B. RENCANA PERBAIKAN TAHUN 2025

Upaya untuk memperbaiki manajemen pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum DPD RI, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dengan mengikuti berbagai pelatihan keahlian sesuai dengan *background* pendidikan dan tugas pokok dan fungsi Pusperjakum.
2. Menyusun Pedoman Penyusunan Kajian Akademis/Artikel Jurnal di lingkungan sekretariat jenderal DPD RI agar dapat menjadi acuan bagi penulis.
3. Selalu berinovasi di bidang *information and technology* sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam mewujudkan

capaian kinerja indikator Rasio jumlah produk hukum yang dipublikasikan.

4. Mengaplikasikan Program Kerja yang sistematis dari awal (proses perencanaan), monitoring hingga proses evaluasi.
5. Melaksanakan kegiatan di Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga setiap kegiatan jelas dan dapat dilaksanakan tepat waktu untuk setiap kegiatan.
6. Mensosialisasikan pedoman standar pengelolaan JDIIH di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI agar dapat berjalan sehingga target penyajian data produk hukum yang update dapat berjalan.
7. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulanan untuk melihat progres pencapaian target. Instrumen tersebut menyangkut beberapa hal, yaitu:
 - rincian aktivitas yang akan dilakukan dalam setiap triwulanan,
 - target triwulanan,
 - rincian anggaran yang akan digunakan dalam triwulanan,
 - jadwal aktivitas secara rinci dalam satu tahun anggaran,
 - pertemuan mingguan untuk membahas permasalahan pelaksanaan kegiatan,
 - pertemuan triwulanan untuk membahas kemajuan pelaksanaan kegiatan,
8. menyusun pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsional di alat kelengkapan DPD RI dan dalam penyusunan kajian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menyeragamkan tahapan-tahapan dalam penyusunan kajian.

Perkembangan tugas Dewan Perwakilan Daerah menuntut adanya pelayanan yang baik dari Sekretariat Jenderal DPD RI. Sebagai salah satu unit kerja pada Sekretariat Jenderal DPD RI, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Pimpinan berada pada posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPD dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Tahun 2024 yang disusun guna mewujudkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian pada DPD RI, secara umum LAK Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum memberikan gambaran capaian yang cukup baik.

Capaian kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum yang cukup baik ini akan dipertahankan dan diupayakan untuk dapat terus ditingkatkan dengan demikian diharapkan kinerja Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum akan mengalami peningkatan di masa yang akan datang.